

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON**

**Oleh:**

**JOHANA SIMORANGKIR**

**Nim: 20043051**



**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUTANSI  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO: .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi.....	6
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah SAP.....	7

2.1.3 Kebijakan Akuntansi Pemerintah .....	9
2.1.4 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah .....	9
2.1.5 Akuntansi Pendapatan .....	11
2.1.6 Klasifikasi Pendapatan .....	11
2.1.7 Pengakuan Pendapatan .....	12
2.1.8 Sistem Akuntansi Pendapatan .....	12
2.1.9 Sistem Akuntansi Daerah Kota Tomohon .....	13
2.1.10 Dokumen yang terkait .....	13
2.1.11 Efektivitas.....	15
2.1.12 Efisiensi.....	15
2.2. Penelitian terlebih dahulu.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	23
3.2 Waktu dan Lokasi penelitian .....	23
3.3 Sumber Data.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
4.1.1 Sejarah Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota.....	26
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota .....	27
4.1.3 Logo Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan daerah Kota Tomohon.....	27
4.1.4 Struktur Organisasi.....	28
4.2 Hasil Penelitian .....	34

1.Sistem Akuntansi Pendapatan Kota Tomohon.....	32
2. Dokumen Sistem Akuntansi Pendapatan.....	33
3.Dokumen Sumber yang di gunakan dalam Sistem Akuntansi Pendapatan.....	34
4.3 Pembahasan.....	36
1.Sistem Akuntansi Pendapataan BPKPKD Kota Tomohon.....	36
2. Kebijakan penerapan Sistem Akuntansi pendapatan BPKPKD Kota Tomohon.....	37
3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan di BPKPKD Kota Tomohon.....	37
4.Prosedur Akuntansi di SKPD.....	46
5. Penerapan Efektif dan Efisien di BPKPKD Kota Tomohon.....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Tomohon salah satu daerah otonom yang ada di Sulawesi Utara yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja demi terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Tomohon dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Tomohon dan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan pemerintah tentang susunan organisasi pemerintah BPKPD Kota Tomohon yaitu membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan Pendapatan daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) Kota Tomohon adalah salah satu Instansi pemerintahan di kota Tomohon yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah serta tugas lain yang diberikan Wali kota sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem akuntansi keuangan yang di maksud

adalah suatu sistem akuntansi keuangan yang diterapkan secara menyeluruh. Sistem akuntansi keuangan di sebuah instansi pemerintahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan.

Kota Tomohon adalah salah Kota Yang ada di Sulawesi Utara yang di tuntutan dalam pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan daerah yang sesuai. Namun Pada kenyataannya masih banyak masalah hambatan-hambatan yang dilalui dalam penyusunan laporan keuangan sehingga penyampaian laporan keuangan belum tepat waktu sehingga tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berlandaskan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yang berisi tentang standar akuntansi Pemerintah dan hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya efektifitas dan efisiensi pelaporan keuangan.

Salah satu upaya yang di lakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penerapan sistem akuntansi pendapatan, salah satunya pendapatan asli daerah yang di peroleh dari nilai kekayaan bersih. Dalam sistem akuntansi pendapatan di Kota Tomohon di lakukan mengakui, mencatat, dan melaporkan pendapatan asli daerah yang berada dalam wewenang SKPD.

BPKPKD Kota Tomohon salah satu pelaksana kegiatan ekonomi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang mempertimbangkan system akuntansi yang telah di terapkan dalam pemerintahan Kota Tomohon supaya terhindar dari penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan pencatatan, pengidentifikasian ataupun dalam pelaporan, sehingga terjadinya keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat merugikan Badan pemerintahan atau pihak-pihak lain .

Salah satu upaya yang di lakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban dan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan

disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah berlaku umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010) Sehingga Permasalahan Yang sering kali di hadapi Oleh instansi Pemerintah adalah sistem Pencatatan dan proses Penyajian Laporan.

Beberapa Penelitian sebelumnya terkait tentang penerapan sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang sudah di lakukan (Muhammad Febriansyah, 2024) tentang Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun yang dalam penyusunan laporan Akuntansi Keuangan Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Penelitian yang di lakukan oleh (Dwi Harini, 2020) Penerapan standar system akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPPKAD Kabupaten Brebes, artinya dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah yang baik, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang

telah di lakukan oleh (Sri Widati,2019) Tentang Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara telah menerapakan system akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 .penelitian lain yang telah di lakukan oleh(Hanum Hasibuan,2020) Penerapan sistem akuntansi berdasarkan komponen laporan keuangan yang disajikan belum optimal dikarenakan masih terdapat proses pencatatan yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 .dalam proses laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas memerlukan sumber daya manusia yang baik, akan tetapi pada Badan Pengelolaan Keuangandan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara masih kurang. Berdasarkan fenomena serta masalah yang ada pada badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan oleh penulis maka penulis mengangkat Permasalahan yang akan di bahas yaitu: Bagaimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan daerah Kota Tomohon?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Badan pengelolah keuangan Dan Pendapatan (BPKPD) Daerah Kota Tomohon

#### 1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah di gunakan untuk menghindari adanya peluasan dan melebarnya pokok permasalahan dalam penelitian serta agar penelitian juga dapat lebih mudah dan terarah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Adapun Batasan dalam penelitian ini yaitu Meliputi Sistem akuntansi Pendapatan pada Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga dapat di harapkan dapat memiliki manfaat. Berikut ini adalah manfaat-manfaatnya:

1. Bagi Instansi Pemerintah BPKPD Kota Tomohon  
Penelitian ini Dapat di gunakan sebagai solusi dalam pemecahan masalah oleh pihak Instansi, sehingga Tujuan manajemen tercapai.
2. Bagi Politeknik Negeri Manado  
Dapat di gunakan sebagai refrensi bagi parah mahasiswa akuntansi yang akan mengembangkan penelitian.
3. Bagi Peneliti  
Penelitian di harapkan Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan pihak yang berkepentingan tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah